

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Tambahi Anggaran Penanganan Covid-19

DPRD Janji Golkan Usulan Dinas Kesehatan

JAKARTA—Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran untuk penanganan Corona sebesar Rp769,25 miliar. Sebagian dari usulan tersebut disetujui oleh DPRD.

Sekretaris Komisi E DPRD Jhonny Simanjuntak, mengatakan usulan penambahan anggaran untuk penanganan Corona itu sempat disampaikan oleh Ketua Dinas Kesehatan Widyastuti saat rapat dengan Komisi E beberapa waktu lalu.

"Karena mereka mengajukan ada hampir Rp700 miliar, tapi yang dikabulkan baru separuh," kata Jhonny, Selasa (23/6/2020). Politikus PDIP itu menilai persetujuan dianggap langkah tepat, agar Jakarta bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penanganan Corona. Oleh karena itu, pihaknya sepakat bakal menyetujui penambahan anggaran tersebut.

Saat ini, imbuh Jhonny, anggaran penanganan Corona di Jakarta baru sekitar Rp380 miliar. Pihaknya bakal



Karena mereka mengajukan ada hampir Rp700 miliar, tapi yang dikabulkan baru separuh."

Jhonny Simanjuntak
Sekretaris Komisi E DPRD

mengabulkan penambahan Rp380 miliar lagi untuk penanganan virus Corona di ibu kota.

"Kalau kemarin hanya Rp380 miliar, ya harus ditambah separuhnya lagi. Karena idealnya ketika Dinkes mengajukan itu, menurut saya, bukan seperti rencana biaya 17 Agustus di tingkat RT. Mereka kan sudah kaji, sudah melalui pemikiran yang matang. Itu harus dipenuhi," tutur dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, juga telah memberikan sinyal bakal mempermudah penambahan anggaran penanganan wabah Corona di Jakarta. Menurut Pras, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus serius dalam penanganan dan pemuliharaan atas dampak pandemi.

"Karena saya banyak mendapat laporan bahwa penanganan pasien COVID-19 ini belum maksimal. Makanya di Komisi E kemarin saat rapat bersama Dinas Kesehatan, saya bilang siap menyetujui penambahan anggaran penanganan COVID-19 ini," tutur Pras, sebagaimana dikutip dari situs resmi DPRD Jakarta.

Dinas Kesehatan DKI sebelumnya menjelaskan bahwa alokasi anggaran penanganan Corona di Jakarta masuk dalam pos belanja tak terduga atau BTT yang disesuaikan dengan prediksi angka kasus positif Corona.

Alokasi anggaran penanganan COVID-19 terbagi menjadi BTT tahap I dan BTT tahap II. Pada BTT tahap I anggarannya mencapai Rp129,32 miliar

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Tambahi Anggaran Penanganan Covid-19

dan seluruhnya cair. Kemudian, pada BTT tahap II Dinkes mengusulkan anggaran sebesar Rp639,92 miliar. Namun Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI hanya menyetujui Rp255,41 miliar dari usulan tersebut. Secara total, anggaran penanganan Corona yang disetujui BPKD DKI senilai Rp384,74 miliar.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga memberikan sinyal bakal mempermudah penambahan anggaran penanganan wabah Corona di Jakarta. Menurut Pras, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus serius dalam penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi.

"Karena saya banyak mendapat laporan bahwa penanganan pasien COVID-19 ini belum maksimal. Makanya di Komisi E kemarin saat rapat bersama Dinas Kesehatan saya bilang siap menyetujui penambahan anggaran penanganan COVID-19 ini," tutur Pras.

Tak Terkendali

Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, tak sependapat dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta,

Anies Baswedan, yang menyebut penyebaran COVID-19 di Jakarta terkendali. Baginya, kalimat itu kontradiksi dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang masih berlaku saat ini.

Dia menuturkan, diksi terkendali dan transisi memiliki makna yang berbeda. Jika keduanya disampaikan saat ini, justru menimbulkan kegamangan di tengah masyarakat. "Pernyataan ini bisa membuat masyarakat gamang, ada pernyataan transisi (masih harus waspada) yang berbeda makna dengan terkendali (sudah aman) oleh orang yang sama," kata Gilbert, di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Politikus PDIP tersebut juga mengungkap alasan lain kenapa dirinya tidak sependapat dengan pernyataan Gubernur Anies. Menurutnya, kluster penyebaran virus Corona nyatanya berada di pasar. Sementara penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak di pasar cukup sulit diterapkan.

Jika begitu, kata Gilbert, memutus mata rantai penularan virus Corona di pasar sangat kompleks. "Saat ini masih ditemukan kluster baru di pasar,

yang diabaikan selama ini. Kita tidak tahu apakah para pedagang ini seberapa besar menularkan ke pembeli atau sebaliknya," ujar mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO tersebut.

Sebaiknya karena Jakarta menyebarkan virus ke daerah dan daerah, sekarang masih berpotensi menular kembali ke Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan kado terindah HUT DKI ke-493 adalah tidak adanya lonjakan kasus COVID-19. Hal itu diketahui dari laporan yang diterima dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia.

"Pada 22 Juni ini kado untuk masyarakat Jakarta bahwa di saat kita memperingati ulang tahun kota ini pada saat ini gelombang pandemi yang pernah besar di Jakarta saat ini sudah terkendali," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/6). Dia mengatakan, dalam dua minggu terakhir masa transisi wabah terkendali di Jakarta, lonjakan tidak terjadi. Bahkan, angka R kasus sekarang sudah di bawah 1, atau tepatnya menjadi 0,98. (dni)